

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengendalian Internal

2.1.1.1. Definisi Pengendalian Internal

Aktivitas perusahaan tidak terlepas kaitannya dengan pengendalian. Pengendalian merupakan suatu bagian fungsi manajemen selain perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian merupakan upaya untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu perusahaan. Pengendalian dilakukan agar penggelapan dapat dicegah dan merupakan suatu upaya melindungi sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pengendalian merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Pengendalian dapat diterapkan melalui beberapa cara diantaranya melalui pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam perusahaan untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang tertata membuat manajemen mampu menghadapi perubahan ekonomi yang pesat, persaingan, pergerakan minat pelanggan serta restrukturasi perusahaan agar mampu menghadapi kemajuan di masa mendatang. Bila pengendalian internal perusahaan lemah, kesalahan dan kecurangan akan banyak terjadi. Sedangkan bila pengendalian internal yang diterapkan kuat, kesalahan dan kecurangan dapat dikurangi Dewi Dan Ratnadi (2017).

Menurut Tuanakotta (2014) pengendalian internal merupakan tindakan untuk memastikan tujuan perusahaan mengenai pelaporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan dapat tercipta melalui proses yang dirancang, diimplementasi dan diterapkan oleh manajemen, karyawan serta pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut.

Pengendalian internal menurut COSO yang terdapat dalam jurnal Yuwannita et al (2016) merupakan suatu aktivitas, dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dibuat dengan tujuan sebagai jaminan yang wajar agar tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan dapat tercapai.

Dalam definisi yang dijelaskan AICPA pengendalian internal meliputi rencana organisasi serta seluruh metode terorganisasi dan ukuran yang diadopsi pada usaha atau bisnis dengan tujuan melindungi harta kekayaannya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi aktivitas dan kepatuhan pada aturan yang ada pada organisasi.

Menurut Mulyadi (2016) “Pengendalian internal dalam arti luas adalah meliputi susunan organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan agar kekayaan organisasi terjaga, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen.”

Selanjutnya, Al-Ma’ (2016), pengendalian internal ialah cara untuk mengawasi para staff manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*) yang bertujuan untuk menjaga serta menjamin harta kekayaan Bank tetap aman, memastikan laporan tersaji dengan tepat, meningkatkan kepatuhan akan peraturan yang ada, mengurangi kerugian yang terjadi dan mencegah penyimpangan diantaranya *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati – hatian, dan menambah efektivitas organisasi dan menerapkan efisiensi biaya.

2.1.1.2. Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum

Standar sistem pengendalian internal bagi bank umum tertuang dalam Surat Edaran OJK.03 NO35 (2017) memaparkan mengenai 5 komponen utama pengendalian intern, diantaranya :

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian,
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko,
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi,
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi,
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.

2.1.1.3. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal sangat diperlukan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian internal dimaksudkan untuk dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian internal harus diawasi untuk dapat melindungi sumber daya yang ada pada perusahaan.

COSO mengemukakan tujuan pengendalian internal yang dikutip melalui Yuwannita et al (2016). Tujuan pengendalian tersebut meliputi tujuan Operasional yang berkaitan dengan efektif dan efisiensi operasi perusahaan yang berkenaan dengan tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta menghindari terjadinya penyimpangan aset perusahaan, tujuan Pelaporan terkait dengan pelaporan baik keuangan maupun nonkeuangan internal dan eksternal dan dapat mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator, pembuat standar dan kebijakan perusahaan, serta tujuan Kepatuhan yang berkaitan dengan ketaatan hukum dan peraturan yang menjadi subjek perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2014) pengendalian Internal bertujuan untuk :

1. Mendukung misi entitas yang di wujudkan dengan cara menjaga keamanan harta perusahaan / menjaga kekayaan organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terkait dengan aset perusahaan, dana investor, dan dana para kreditur baik yang disengaja ataupun tidak.
2. Menjamin data pelaporan keuangan dengan memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Penciptaan suatu sistem pengendalian intern didalam perusahaan diharapkan mampu menjamin keandalan atau dapat dipercayainya seluruh data akuntansi yang dihasilkan seperti laporan keuangan perusahaan. Keandalan data akuntansi akan sangat mempengaruhi informasi yang nantinya dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan, dimana akan sangat membantu didalam proses pengambilan keputusan yang tepat.
3. Bertujuan agar efisiensi dalam perusahaan dapat tercapai. Efisiensi perusahaan mendukung terwujudnya prestasi kerja perusahaan.

4. Mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang disesuaikan dengan hukum dan ketentuan perundang-undang.

Dalam Otoritas Jasa Keuangan - POJK 39/POJK.03 (2019), tujuan dari sistem pengendalian internal adalah bank:

1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

2. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi.

Tujuan Informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha Bank atau Tujuan Operasional.

Tujuan Operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari Risiko kerugian.

4. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi Bank Secara Menyeluruh atau Tujuan Budaya Risiko.

Tujuan Budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Berdasarkan beberapa tujuan pengendalian internal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi sumber daya suatu perusahaan. Selain itu pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan.

2.1.1.4. Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Internal Bank

Menurut Surat Edaran OJK.03 NO35 (2017), terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi

Direksi Bank bertugas untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sesuai tujuan perusahaan serta menjamin keamanannya. Sementara itu direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan manajemen dan menetapkan kebijakan sesuai tujuan perusahaan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank berperan melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengendalian internal sesuai kebijakan Direksi dan tujuan perusahaan.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI bertugas mengevaluasi serta berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dan kebijakan perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerugian Bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit internal yang independen melalui sarana pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor internal khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian Risiko.

4. Pejabat dan pegawai Bank

Pejabat dan pegawai Bank harus memahami dan melaksanakan SPI yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Pengendalian intern yang efektif akan mendeteksi kecurangan-kecurangan atau mempercepat identifikasi terhadap kebijakan perusahaan yang tidak sesuai.

5. Pihak-pihak eksternal

Pihak-pihak eksternal Bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan, auditor ekstern, dan nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Standar Pengendalian Internal Bank yang andal dan efektif.

2.1.1.5. Unsur Pengendalian Internal

Untuk dapat menyelenggarakan suatu pengendalian internal yang berhasil dan memuaskan, menurut Mulyadi (2016), ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi. Unsur-unsur pengendalian internal tersebut meliputi :

1. Struktur organisasi yang terpisah dengan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi.
4. Karyawan yang tanggung jawab atas tugasnya.

2.1.1.6. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Susanto (2013) ada beberapa keterbatasan pengendalian internal, sehingga fungsinya tidak berjalan baik. Keterbatasan pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan (*Error*)

Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.

2. Kolusi (*Collusion*)

Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja. Manajer biasanya lebih memilih untuk menggunakan karyawan yang baik dibandingkan harus menerapkan kebijakan prosedur untuk mendeteksi pencurian dimana kolusi terjadi.

3. Penyimpangan manajemen

Penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer dan karyawan biasanya terjadi karena rendahnya kualitas pengendalian internal. Manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas. Penyimpangan yang dilakukan oleh manajer seperti kolusi sulit untuk dicegah dengan berbagai alasan. Langkah yang dilakukan adalah dengan

mengerjakan manajer yang baik dan memberikan kompensasi yang layak agar memberikan kinerja yang baik.

4. Manfaat dan biaya.

Pengendalian internal yang digunakan suatu perusahaan harus memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Agoes (2017) berpendapat bahwa manfaat yang didapat perusahaan harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itulah manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif dipertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

Menurut Tunggal (2012) yang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian adalah dikesampingkannya pelaksanaan pengendalian, prosedur pengendalian yang tidak dilaksanakan oleh seluruh staff, dan terjadinya kolusi antara individual sehingga efektivitas pemisahaan tugas tidak terlaksana.

2.1.1.7. Dimensi Pengendalian Internal

Menurut COSO (2015) dimensi pengendalian internal diantaranya sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal dan manfaat bagi perusahaan.

b. Penilaian Risiko

Yaitu tindakan manajemen yang dilakukan dengan cara identifikasi dan analisis risiko yang berdasar pada susunan laporan keuangan berdasarkan prinsip umum akuntansi.

c. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan yang berisi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang disusun berdasarkan tujuan perusahaan.

d. Informasi dan Komunikasi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi tujuan umum setiap transaksi.

e. Aktivitas pengawasan

Pemantauan pengendalian internal yang telah berjalan dan memastikannya telah sesuai dengan kondisi saat ini.

Indikator pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan aktivitas pengawasan. Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan / ketidaksesuaian aktivitas dengan hal-hal yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mendukung terwujudnya tujuan perusahaan.

2.1.2. Integritas

2.1.2.1. Definisi Integritas

Integritas adalah karakter yang merupakan dasar kepercayaan publik serta merupakan standar pengukuran untuk menguji keputusan yang akan diambil. Integritas merupakan dasar atas sikap jujur tanpa harus merugikan pihak lain dalam hal ini pihak penerima jasa, dengan kata lain kepentingan pribadi harus dikesampingkan. Perbedaan pendapat, kesalahan atas ketidaksengajaan dapat ditoleransi namun tidak untuk kecurangan/ penyimpangan.

Pengukuran integritas diukur berdasarkan keadilan dan kebenaran. Namun juga mengedepankan aturan, standar, panduan khusus, serta pendapat yang bertentangan. Integritas mengharuskan pelaksanaan prinsip kehati-hatian profesional.

Schlenker yang dialih bahasakan oleh Nita & Supadmi (2019) menjelaskan bahwa integritas merupakan produk dari etika dan sikap sebuah perusahaan dengan tujuan mengurangi keinginan personel untuk berperilaku tidak jujur. Integritas juga mencakup kode etik personel.

Integritas adalah keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup (Riaweny, 2020).

Integritas dapat di definisikan sebagai sikap jujur dan transparan yang di jalankan dengan keberanian serta tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Integritas dapat dijadikan acuan penilaian kualitas kepercayaan masyarakat yang harus dimiliki oleh karyawan.

2.1.2.2. Pengukuran Integritas

Menurut Agoes (2017) seorang harus memiliki integritas sebagai berikut:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik
 - a. Mengikuti kode etik profesi.
 - b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup otoritasnya.
 - c. Meluangkan waktu memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya.
 - a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan keyakinan.
 - b. Berbicara dengan ketidaktepatan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.
3. Berdasarkan nilai (*value*) dan keyakinannya meskipun sulit untuk melakukan hal tersebut.
4. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.
 - a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
 - b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.

2.1.3. Pencegahan Kecurangan (Fraud)

2.1.3.1. Definisi Kecurangan (Fraud)

Kecurangan atau *Fraud* menurut Fahmi (2014) mengandung arti penipuan, kebohongan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data transaksi, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan mengubah fakta

serta menghilangkan barang bukti secara sengaja.

Kemudian Fahmi (2014) juga menjelaskan *Fraud* secara umum kegiatan yang menyebabkan kerugian pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi / kelompok. Pendapat Karyono (2013) dalam Sudarmanto & Utami (2021), *fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang - peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Kecurangan ialah penipuan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Sedangkan kecurangan yang lebih khusus menurut Siegel dan Jae (1981) dalam Fahmi (2014) kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian dengan cara penyajian yang keliru (*misrepresentation*).

Fraud itu sendiri secara umum tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang melanggar hukum dan memberi dampak negatif bagi pihak tertentu dan sering di sebut sebagai korupsi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - POJK 39/POJK.03 (2019) tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, pencegahan fraud dalam penelitian ini berarti suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pencegahan kecurangan/penyimpangan yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi seta menipu pihak Bank dan pihak terkait yang mengakibatkan pihak lain mendapat dampak negatif berupa kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.2. Faktor – faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Fraud dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor lingkungan, sistem maupun faktor manusia sendiri. Menurut *Oversights Systems Report on Corporate Fraud* dalam Suryana & Sadeli (2017) tekanan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, dan rasa ketidakpedulian atau menyepelekan perbuatan merugikan orang lain merupakan alasan utama penyebab terjadinya fraud.

Kemudian menurut Fahmi (2014) dapat dikelompokkan empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, sering disebut dengan teori GONE, yaitu:

- 1) *Greed* (keserakahan)
- 2) *Opportunity* (kesempatan)
- 3) *Need* (kebutuhan)
- 4) *Exposure* (pengungkapan)

Menurut Sumbayak (2017) kondisi penyebab kecurangan disebut segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*), yaitu:

1. Insentif/tekanan (*pressure*), seperti masalah keuangan, sifat buruk (penjudi, pecandu narkoba, konsumtif), lingkungan pekerjaan (kondisi kerja yang buruk, diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan) dan lingkungan keluarga.
2. Kesempatan (*opportunity*), seperti sistem pengendalian internal yang lemah, tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, atau gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.
3. Sikap/rasionalisasi (*rationalize*). Seperti mencontoh atasan atau teman sekerja, merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa dan hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.

Faktor penyebab *Fraud* menurut Hidayatun & Juliarto (2019) terdiri dari tiga kondisi yaitu:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*)

Tekanan dapat dibagi menjadi empat tipe yang terdiri dari masalah keuangan, terlibat perbuatan kejahatan serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan

tekanan-tekanan lain.

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)

Peluang tersebut biasanya di dukung dengan sistem pengendalian internal yang lemah dan tata kelola organisasi buruk.

3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*)

Rationalization dari pelaku yang mencari pembenaran bahkan merasa bahwa hal tersebut merupakan hak dari apa yang telah di berikan pada perusahaan.

2.1.3.3. Indikator Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Solusi pencegahan *Fraud* menurut Fahmi (2014) dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan sistem pengendalian intern,
2. Memberi insentif yang sesuai bagi pegawai,
3. Melakukan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas,
4. Meningkatkan aktivitas pemeriksaan,
5. Menumbuhkembangkan iklim keterbukaan,
6. Adanya suri tauladan yang baik dari pimpinan,
7. Penerapan sanksi yang tegas.

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya:

1. Pemahaman tentang anti kecurangan
2. Peningkatan kualitas SDM dengan cara:
 - a. Melakukan sistem dan prosedur perekrutan yang efektif sehingga dapat diperoleh gambaran rekan jejak calon karyawan.
 - b. Sistem seleksi yang dilengkapi dengan kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan resiko.
 - c. Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku dan gaya hidup yang melebihi penghasilan

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Tunggal (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi
 - a. Menetapkan *Tone at the Top*
 - b. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif
 - c. Mempekerjakan dan Mempromosikan Pegawai yang Tepat
 - d. Pelatihan
 - e. Konfirmasi
2. Tanggung jawab Manajemen untuk Mengevaluasi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
3. Pengawasan Oleh Komite Audit.
 - a. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
 - b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
 - c. Meningkatkan kultur organisasi
 - d. Mengefektifkan fungsi internal audit

Berdasarkan teori yang ada, penelitian ini melakukan pengukuran pencegahan fraud dengan cara meningkatkan sistem pengendalian internal melalui pemeriksaan kegiatan operasional secara berkala, pembinaan karyawan, mengembangkan budaya organisasi yang baik dan pemberian sanksi secara tegas.

2.1.3.4. Strategi Anti Fraud

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - POJK 39/POJK.03 (2019), Strategi anti fraud diterapkan dengan menggunakan perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan melalui penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud* kepada pihak internal dan eksternal bank terkait kebijakan dan komitmen bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud*.

Selain itu, program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai juga dapat mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi pegawai, Bank dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah juga perlu di sosialisasikan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk, poster, kartu taktil anti *Fraud*, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

b. Identifikasi Karyawan

Identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Bank melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi intern maupun ekstern Bank. Hasil identifikasi selain didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

Beberapa faktor intern Bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- a) Kurangnya pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*;

- b) budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan;
- c) kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk representasi, hiburan serta sumbangan amal dan politik;
- d) pengendalian keuangan yang kurang memadai; dan
- e) kurangnya arahan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*;
- f) Kebijakan Mengenal Pegawai.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank. Salah satu yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah kebijakan dan mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) yang ditujukan untuk melindungi para pelapor kecurangan.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

- a. Investigasi
- b. Pelaporan
- c. Pengenaan Sanksi

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut fraud yang terjadi.

Pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud*, menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berikut referensi penelitian terdahulu yang menjadi dasar dibuatnya penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ratnadi (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian

internal dan integritas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kota Denpasar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi dan *Fraud Triangle Teory*. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden dengan teknik penentuan sampel nonprobability sampling dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kota Denpasar.

Novita Wulandari et al., (2018) penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan bukti pengaruh pengendalian internal, kesadaran anti *fraud*, integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berada pada unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara I, V, dan VII. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 149 responden. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran anti*fraud* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Purnamawati (2018) penelitiannya bertujuan untuk mengetahui persepsi individu mengenai perilaku etis dan whistleblowing pada pendeteksian fraud melalui self-efficacy. Studi pada sektor perbankan yang ada di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampelnya menggunakan metode simple random sampling, dengan jumlah sampel yaitu 70 responden. Whistleblower merupakan pegawai dan atau pemegang saham yang melihat beberapa tindakan yang salah dapat secara independen dan tanpa dipublikasikan melaporkan aksi tersebut kepada manajemen perusahaan tanpa takut adanya aksi timbal balik. Jenis data dalam

penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran dengan skala Likert. Analisis data penelitian menggunakan model analisis regresi berjenjang. Hasil penelitian menunjukkan:

1. Persepsi individu mengenai perilaku etis tidak berpengaruh terhadap pendeteksian fraud.
2. Whistleblowing dan *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud.
3. *Self efficacy* tidak berhasil memoderasi hubungan antara persepsi individu mengenai perilaku etis terhadap pendeteksian fraud.
4. *Self efficacy* tidak berhasil memoderasi hubungan antara whistleblowing terhadap pendeteksian fraud.

Al-Ma' (2016) bertujuan untuk menganalisa pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap fraud, menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap fraud, serta menganalisa pengaruh efektivitas pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia secara simultan terhadap fraud pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban empiris bagi hipotesis penelitian yang di ajukan, serta bisa berguna dan menjadi saran yang positif bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung yang penulis jadikan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pengujian uji t secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap fraud. Berdasarkan hasil perhitungan uji f disimpulkan H_0 ditolak, artinya secara simultan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap fraud.

Rundi Hartono (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam apa yang memotivasi pelaku kejahatan perbankan. Studi eksplorasi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan. Bukti diambil dari berbagai kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia tahun 2017 – 2018. Berdasarkan

hasil analisa, ditemukan bahwa hampir 50% *fraud* perbankan terjadi pada bank pemerintah dan 80% pelaku *fraud* perbankan adalah di tingkat manajemen. Motif financial adalah alasan utama pelaku melakukan kejahatan perbankan. Pengawasan internal perbankan yang lemah, Rendahnya pengawasan internal control serta kepercayaan nasabah kepada perbankan, dijadikan kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatan oleh pelaku. Mengasumsikan kedudukan dan jabatan yang dimiliki untuk dapat bertindak over-reaction, serta implementasi nilai-nilai entitas yang tidak efektif dijadikan suatu pembenaran untuk bertindak menyimpang. Keterbatasan penelitian ini adalah terbatas pada penelitian perbankan oleh sebab itu dibutuhkan penelitian lanjutan seperti di sektor non-perbankan dan juga dapat dikaitkan dengan manajemen resiko agar tingkat kejahatan di menejerial level dapat diminimalisir.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Variabel Pengendalian internal dengan Variabel Pencegahan Fraud

Pengendalian Internal sangat terkait dengan tata kelola, operasi, dan sistem informasi. Pengendalian internal juga dapat mengukur sejauh mana efektivitas, tujuan operasi dan tujuan program telah tercapai. Kesalahan penetapan pengendalian internal dalam suatu perusahaan akan menciptakan konflik kepentingan antara prosedur dan kebijakan yang ditetapkan dengan apa yang dilaksanakan karena pengendalian Internal merupakan rencana, metode, teknik dan prosedur yang digunakan untuk memenuhi misi, tujuan, dan sasaran organisasi, dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasinya. Oleh karena itu proses pengendalian internal dapat dikatakan sebagai tata kelola sebuah organisasi (Becker et al., 2015).

Pengendalian internal mengatur kerangka kerja perusahaan, dimana kerangka kerja tersebut digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengawasi kegiatan perusahaan yang dianggap tidak sesuai / menyimpang dari tujuan perusahaan. Penerapan identifikasi dan pengawasan yang diatur dalam pengendalian internal perusahaan diharap dapat membantu menemukan dan

menghilangkan penipuan aktivitas / kecurangan-kecuragan yang dapat membahayakan reputasi dan kesuksesan perusahaan.

Penerapan pengendalian internal tidak terlepas kaitannya dengan Bank Capital. Bank Capital telah melakukan upaya untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi diperusahaan sehingga tidak berdampak pada kerugian bagi nasabah maupun bagi PT Bank Capital Indonesia Tbk Wilayah Jakarta. Bank Capital telah mengatur aktivitas usahanya sesuai dengan hal-hal yang termasuk dalam unsur pengendalian internal. Beberapa yang telah dilakukan Bank Capital sebagai upaya melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*) diantaranya menyusun struktur organisasi dengan tanggung jawab fungsional yang jelas dan tegas, telah membuat wewenang dan prosedur perusahaan untuk melindungi kekayaan perusahaan, serta menerapkan praktek yang sehat dalam melaksanakan fungsi organisasi.

H1 = Pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT Bank Capital Indonesia, Tbk wilayah Jakarta.

2.3.2. Hubungan Variabel Integritas Karyawan dengan Variabel Pencegahan Fraud

Menurut Becker et al., (2015) Integritas adalah sebuah konsep yang pada dasarnya berkaitan dengan adanya konsistensi dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang . Tidak hanya itu saja tetapi hal ini juga menyangkut berbagai macam nilai dan metode serta beberapa ukuran ataupun prinsip seseorang mengenai suatu hal. Bahkan di dalam instgritas ini terdapat berbagai macam ekspektasi mengenai hasil dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan. Maka orang yang berinbtegritas bisa digolongkan sebagai orang yang memiliki kepribadian atau karakter jujur dan kuat. dengan karakternya tersebut maka segala pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan lancar serta tepat. Tentunya hasil kerja dari orang yang demikian akan baik dan bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan.

Integritas juga diartikan sebagai bentuk ketahanan diri seseorang agar terhindar dari bermacam tekanan supaya tidak mementingkan kepentingan sendiri serta mengabaikan kepentingan orang banyak. Integritas merupakan ukuran

kualitas seseorang untuk menguji semua keputusan yang dibuat sebagai landasan kepercayaan publik. Seseorang yang memiliki integritas harus memiliki sikap kejujuran, transparan, berani dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Adanya konflik kepentingan tidak terlepas dari pelaksanaan ketidakpatutan. Oleh karena itu, integritas sangat erat kaitannya dengan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Untuk mewujudkan terciptanya karyawan yang memiliki integritas, Bank Capital berupaya untuk menerapkan doktrin kepada karyawan untuk dapat mematuhi peraturan. Selain itu, Bank Capital juga memberikan fasilitas *whistleblowing system*. Dimana *whistleblowing system* merupakan himbauan untuk mengajak seluruh pihak baik karyawan, nasabah dan mitra usaha untuk melaporkan kepada Departemen Anti Fraud apabila mendengar, melihat dan mengetahui adanya indikasi fraud di PT Bank Capital Indonesia Tbk.

H2 = Integritas karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT Bank Capital Indonesia, Tbk wilayah Jakarta.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam suatu kerangka pemikiran digambarkan secara definitif konsep pengaruh variabel diartikan sebagai suatu hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel yang digunakan adalah

1. Variabel Independen yaitu :

a. X1 = Pengendalian internal

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reabilitas, pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.

b. X2 = Integritas

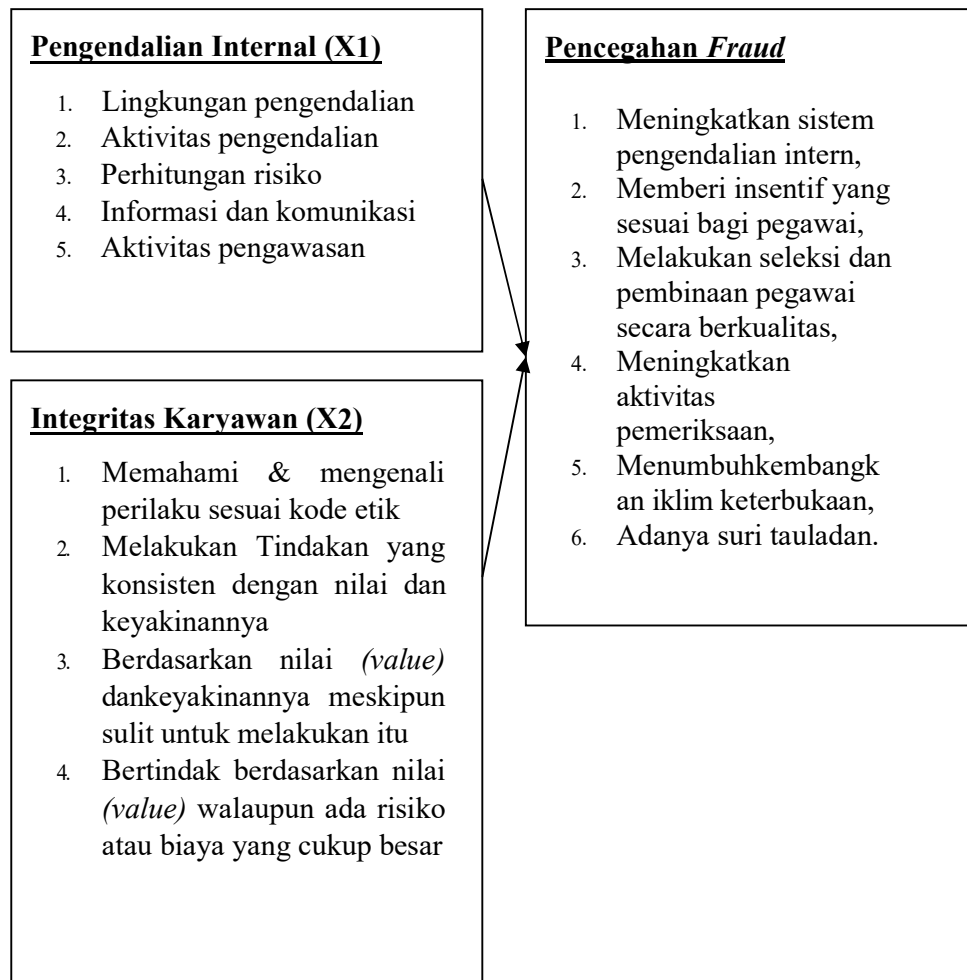
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional dan integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

2. Variabel dependen yaitu:

$$Y = \text{Pencegahan } fraud.$$

Kecurangan atau *Fraud* merupakan penipuan, kebohongan, kejahatan, penggelapan barang, menipulasi data transaksi, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan mengubah fakta serta menghilangkan barang bukti secara sengaja.

Memperjelas kerangka pemikiran di atas, maka ketiga variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian